



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI
(BIDANG: ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, RISET DAN TEKNOLOGI)**

Tahun Sidang	: 2020- 2021
Masa Persidangan	: III
Rapat	: Ke - 4 (Empat)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala BPH Migas
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 27 Januari 2021
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI Gedung Nusantara I Lantai I, secara tatap muka dan <i>virtual</i>
Acara	: 1. Progres dan kendala program digitalisasi SPBU 2. Perkembangan Realisasi program BBM satu harga 3. Sosialisasi BPH Migas kepada masyarakat Tahun 2021 4. Lain-lain
Ketua Rapat	: Ramson Siagian (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P. Gerindra)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir	: A. Pemerintah 1. Kepala BPH Migas 2. Anggota Komite BPH Migas B. 35 Orang Anggota dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI terdiri dari: 15 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik 20 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual 16 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Rabu, 27 Januari 2021 dibuka pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Ramson Siagian, selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Progres dan kendala program digitalisasi SPBU
 - b. Perkembangan Realisasi program BBM satu harga
 - c. Sosialisasi BPH Migas kepada masyarakat Tahun 2021
 - d. Lain-lain

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BPH Migas agar meningkatkan koordinasi dengan Dirut PT Pertamina (Persero) untuk segera melakukan penyelesaian program digitalisasi SPBU dalam rangka pengawasan dan pengendalian BBM bersubsidi, termasuk pemasangan *Automatic Tank Gauge (ATG)*, *Electronic Data Capture (EDC)*, serta CCTV analitik.
2. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BPH Migas untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi Hilir Migas kepada masyarakat, dan untuk kelancaran pelaksanaan sosialisasi di daerah-daerah agar berkoordinasi dan bersinergi dengan anggota Komisi VII DPR RI dan agar untuk pelaksanaannya menyesuaikan pada waktu-waktu reses.
3. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BPH Migas untuk menambah jumlah lokasi BBM 1 harga di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) agar percepatan ketersediaan dan distribusi BBM di masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi dan untuk meningkatkan pengawasan dalam proses pelaksanaan penyalur BBM satu harga.
4. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BPH Migas untuk meningkatkan pengawasan kepada PT. Pertamina (Persero) agar meminimalisir *losses* di setiap SPBU.
5. Komisi VII DPR RI mendukung Kepala BPH Migas untuk segera memiliki Bagian Anggaran yang terpisah dengan Kementerian ESDM dan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan RI, dalam rangka meningkatkan profesionalisme, independensi, dan efektifitas kinerja BPH Migas.
6. Komisi VII DPR RI akan mengajukan surat resmi kepada Menteri Keuangan RI sesuai dengan mekanisme yang ada, agar rencana Bagian Anggaran terpisah tersebut dapat direalisasikan
7. Komisi VII DPR RI akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Kepala BPH Migas, Dirut PT. Pertamina (Persero), dan Dirut PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk, terkait progres kerjasama program Digitalisasi SPBU.

8. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BPH Migas untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 3 Februari 2021.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 13.00 WIB

Jakarta, 27 Januari 2021

KEPALA BPH MIGAS

KETUA RAPAT,

DR. M. FANSHURULLAH ASA, MT

RAMSON SIAGIAN
A-104